

DUGAAN KORUPSI DI KEMNAKERTRANS

KPK Tetapkan Tiga Tersangka

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI tahun anggaran 2012. Kedua tersangka itu adalah mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman dan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnakertrans I Nyoman Darmanta.

Selain dua tersangka tersebut, jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, KPK juga menetapkan seorang dari pihak swasta yakni Direktur PT Adi Inti Mandiri,

Karunia. Penetapan status tersangka itu setelah melalui berbagai proses mulai dari penerimaan laporan hingga penyelidikan.

"Hasilnya, kami mendapatkan alat bukti yang cukup dan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Selain itu kami mengumumkan para tersangka," kata Alexander Marwata di KPK Jakarta, Kamis (25/1).

Disampaikan juga bahwa atas dasar kebutuhan penyidikan tersangka Reyna dan Nyoman Darmanta langsung ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK. Hal ini, kata Alex, untuk mengingatkan satu tersangka lainnya, yakni Karunia agar kooperatif ketika dipanggil KPK.

Mengenai kasus yang menjerat tiga ter-

sangka ini, ungkap Alex, bermula pada tahun 2012 ketika dalam upaya melakukan pengolahan data proteksi TKI, Kemnakertrans melaksanakan pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI).

Reyna selaku Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker kemudian mengajukan anggaran sebesar Rp 20 miliar. Sedangkan Nyoman Darmanta ditunjuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK). Kemudian pada Maret 2012, Reyna, Nyoman dan Karunia bertemu menyusun harga perkiraan sendiri untuk proyek ini. Pertemuan itu juga menyepakati proyek ini akan dikerjakan oleh perusahaan Karunia. (Ful)-f

DALAM TIGA HARI KE DEPAN

DIY Masih Berpotensi Hujan Deras

YOGYA (KR) - Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY kembali memprediksi hujan lebat disertai petir masih berpotensi terjadi di wilayah DIY dan sekitarnya dalam tiga hari ke depan. Hal ini berdasarkan hasil analisis dinamika Atmosfer terkini.

BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengidentifikasi terpantau adanya tekanan rendah di sebelah Utara Australia. Ini membuat pola angin baratan (Monsoon Asia) yang mendominasi wilayah Jawa pada umumnya dan DIY khususnya, sehingga yang bertiup dari arah Barat Daya-Barat Laut dengan kecepatan berkisar 20-30 kilometer/jam.

"Adanya aktivitas MJO di Kuadran 5 didukung terjadinya pertemuan arus angin di wilayah Jawa serta hasil analisis terkini dari profil vertikal kelembapan udara di wilayah DIY pada ketinggian 1,5-5,5 km (level 850-500 mb) berkisar antara 50-95 persen (cukup basah)," kata Kepala Stasiun Meteorologi BMKG DIY Warjono, Kamis (25/1).

Menurutnya, aktivitas MJO ini yang menyebabkan potensi pertumbuhan awan hujan dapat terjadi di wilayah DIY bagian Selatan pada pagi hari dan Utara siang-malam hari. Mempertimbangkan hal tersebut, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta memprakirakan cuaca di wilayah DIY periode selama tiga hari ke depan masih hujan dengan intensitas sedang ke lebat.

Pada 26 Januari, potensi hujan sedang hingga lebat di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Gunungkidul dan Kulonprogo bagian Utara. Tanggal 27 Januari, potensi hujan sedang hingga lebat di Sleman dan Kulonprogo bagian Utara. Dan di 28 Januari, potensi hujan sedang hingga lebat di Sleman, Gunungkidul dan Kulonprogo bagian Utara.

"Masyarakat diimbau waspada terhadap hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang serta waspada gelombang tinggi (2,5-4,0 meter) di Perairan Selatan DIY," jelasnya. (Awh)-f

Densus

(Tri) baik bermasyarakat," katanya.

Selain dirinya yang diminta menyaksikan pengeledahan, istri Tri juga berada disana namun hanya duduk terdiam. Takmir Masjid An Nur Dukuh Kebakjetis, Sutopo mengatakan Tri merupakan jemaah masjid yang taat dan dipercaya mengurus kelembagaan di masjidnya. Tak sedikitpun Sutopo menaruh curiga Tri terlibat kejahatan apalagi jaringan teroris. "Orangnya baik. Kami kaget saat banyak polisi datang ke rumahnya untuk melakukan pengeledahan. Kami juga tidak tahu kalau Tri terlibat jaringan teroris," tuturnya.

Pengurus Karangtaruna Kebakjetis, Agus Syamsudin mengatakan Tri Arianto

tak menunjukkan gelagat mencurigakan selama bermasyarakat. "Warga kampung sini kenal baik mas Tri. Aktif di kegiatan kampung. Sangat kaget kenapa ditangkap polisi.

Tri berprofesi sebagai pedagang makanan ringan di Jalan Kebakkramat - Tasikmadu, Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat. Parman (45) penjual makanan di sekitar lokasi penangkapan mengatakan sejumlah pria meringkus Tri sekitar pukul 09.00 WIB. "Saat itu, banyak mobil dan motor di depan toko besi seberang warung saya," katanya.

Terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas

Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya penegakan hukum dilakukan oleh Densus 88 Antiteror Polri di wilayah Jateng.

"Benar (ada penangkapan) oleh Detasemen Khusus 88 Polri di daerah Jateng," ungkapnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (25/1).

Berdasarkan informasi awal bahwa penangkapan dilakukan terhadap 10 orang terduga di wilayah Solo Raya. Hal ini dibenarkan oleh Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Aswin Siregar. "Benar ada kegiatan Densus 88. Nanti updatenya kami sampaikan lewat Humas Polri," ujarnya. (Lim/Ant)-f

Sambungan hal 1

KPU

Indonesia. Hasyim menjelaskan, aksi tanam pohon bertujuan untuk melestarikan lingkungan yang batang-batang pohonnya harus ditebang untuk memenuhi kebutuhan kertas dan kotak surat suara.

"Logistik pemilu yang berbahan kertas ini memerlukan bahan yang begitu banyak. Dalam catatan kami, logistik pemilu yang berbahan utama kertas diperlukan sebanyak 65.989 ton. Dalam hitungan kami, setiap bibit pohon itu setara dengan 11,6

kilogram kertas," jelasnya.

Dengan demikian, jika jumlah keseluruhan bibit yang ditanam dikalikan dengan 11,6 kg, hasilnya setara dengan 66.234.816 kg kertas atau 66.234 ton kertas. "Ini kami berusaha reboisasi atau melakukan konservasi atas penggunaan bahan kertas di dalam Pemilu 2024," ucap Hasyim.

Tiga langkah KPU itu, pelantikan anggota KPPS, bimbingan teknis dan aksi

penanaman pohon serentak kemudian mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). MURI mengumumkan KPU RI mencetak tiga rekor untuk pelantikan serentak anggota penyelenggara pemilu terbanyak, bimbingan teknis serentak kepada anggota pemilu terbanyak dan penanaman bibit pohon terbanyak secara serentak oleh anggota penyelenggara pemilu terbanyak. (Ant/Obi)-f

Sambungan hal 1

Terjadi

Sungai Woro maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km.

Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya APG di dalam daerah potensi bahaya.

Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penambangan pasir atau batu di lereng Gunung Merapi, khususnya di daerah

potensi bahaya di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III. "Seharusnya semua wilayah KRB III memang tidak boleh ada aktivitas termasuk penambangan," kata Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY LiikAndi Ariyanto.

Menurut Liik, hal itu sesuai rekomendasi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPP-TKG) yang hingga kini masih menetapkan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.

Disampaikan, KRB III merupakan kawasan yang sangat berpotensi ter-

dampak lontaran material vulkanik, awan panas, dan aliran lava saat terjadi erupsi Merapi. "Rekomendasi masih seperti yang sebelumnya. Belum ada perubahan," ujarnya.

Adapun di luar KRB III, Liik meminta aktivitas penambangan di sungai-sungai berhulu Merapi berhenti sementara saat terjadi hujan di puncak Merapi yang berpotensi memicu lahar hujan. "Demi keselamatan bersama, apabila terjadi hujan lebat supaya menjauh dari sungai yang bisa berpotensi terjadi lahar hujan," pesannya. (Dev/Ant)-d

Sambungan hal 1

Nasionalisme

Tidaklah mudah tentunya menjaga dan tetap konsisten pada jalur ini. Karena pilihan atas nasionalisme politik adalah pilihan untuk mengesampingkan egosentrik maupun sektoral yang secara fitrah bersemayam dalam *cultural nationalism* masing-masing etnis. Peleburan ego inilah yang kemudian harus ditampung secara setara dalam wadah (kual) atas nama cita-cita politik bersama.

Bayang-bayang rataknya kual nasionalisme politik menjadi keniscayaan yang harus terus dihadapi setiap rezim yang memimpin negara. Karena bukan perkara *remeh temeh* untuk mempertahankan kehendak bersama yang dibangun di atas kaki pluralisme budaya, agama, adat, dan nilai. Maka, ketika nasionalisme politik gagal merealisasikan janjinya, anasir nasionalisme kultural akan kembali menguat (Yudi Latif, 2011).

Dalam situasi seperti ini, jika dibarengi dengan menguatnya (kembali) ego kultural maka sumbu perpecahan akan mudah sekali terkonsentrasi secara komunal. Untuk kemudian menunggu waktu untuk tersulut dan meledak.

Pekerjaan besar bangsa ini bukanlah pada membangun perspektif utopis atas

pilihan konsepsi ideologis yang berharga mati. Akan tetapi tentang bagaimana mempertahankan kehendak (politik) bersama dari komunitas-komunitas kebudayaan, agama, dan etnis dimana dalam diri mereka bersemayam secara turun temurun selama ratusan tahun atas, simbol, mitos, dan habitus ritual. Setiap rezim pemerintahan harus mampu membangun momentum yang meneguhkan bahwa kehendak bersama atas cita-cita kebangsaan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah harga mati yang sebenarnya. Kedewasaan dalam proses demokratisasi pada akhirnya menjadi pilihan rasional atas dasar kesadaran komunal untuk mewujudkan cita-cita politik kebangsaan tersebut.

Semua aspek, baik pada aras politik, sosial-budaya, ekonomi dan pertahanan untuk merealisasikan kehendak bersama tersebut saat ini dititipkan kepada para kontestan pemilu mendatang. Mereka harus memahami dengan baik tentang bagaimana menjaga isu pluralism, dimana sentimen postitif atas isu tersebut akan bekerja jika jaminan atas hak-hak sipil-politik dan hak-hak sosial budaya

kelompok masyarakat mampu terakomodir secara adil. Jaminan atas hak asasi kemanusiaan dan ruang privasi diatas tidak boleh dikesampingkan atas nama kepentingan negara. Sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus proyek-proyek strategis nasional yang terkesan memberangus hak-hak asasi individual atau komunitas.

Sejarah panjang revolusi negara ini memang memberikan petunjuk atas pilihan-pilihan konsepsi kenegaraan paling rasional yang harus dipilih yakni nasionalisme (sipik) politik. Apakah ini pilihan yang ideal? Bisa ya, bisa juga tidak, sangat tergantung pada dinamika sosial politik yang terjadi. Maka sebenarnya tidak ada harga mati dalam pilihan pilihan konsepsi kenegaraan. Karena bisa jadi kita tidak sedang mencari yang sangat ideal dalam konteks membaca semesta kebangsaan yang sarat dengan keberagaman nilai dan symbol. Akan tetapi mencari yang paling rasional untuk menampung keberagaman tersebut atas nama toleransi.

(Penulis adalah Tenaga Ahli Politik Pemerintahan DPRD Kabupaten Sleman dan pemerhati isu sosial politik)-f

Sambungan hal 1

Pelaku

Korban sebagai slave dan terdakwa menjadi master, lokasinya di kos terdakwa Waliyin di Krapyak Triharjo Sleman," ungkap JPU.

Terdakwa Ridduan lantas melakukan perjalanan menggunakan kereta api dari Jakarta menuju Yogya, Senin 10 Juli pukul 07.00. Sesampainya di Yogya, ia dijemput oleh Waliyin lalu menuju kos terdakwa di Krapyak Sleman. "Senin 10 Juli 23.00 terdakwa 1 (Waliyin) menjemput korban Redho Tri Agustian di Tamanirto Kasihan Bantul dengan sepeda motor dan kembali ke kos pukul 00.30 menemui terdakwa 2 (Ridduan) yang telah menunggu di kos. Lalu terdakwa 1 meninggalkan kos dan terdakwa 2 serta korban masuk ke kamar tengah untuk melakukan skin," lanjutnya.

Kemudian, terdakwa Ridduan sempat mengikat tangan dan kaki korban juga mulut dengan tali serta lakban. Terdakwa juga melakukan kekerasan memukul perut dan dada korban sampai 15 menit. Terdakwa dua Ridduan sempat beristirahat sambil mengelus perut korban yang kesakitan. Namun kemudian, karena nafsu perilaku seks menyimpang, terdakwa lalu memukul lagi hingga korban terjatuh.

"Kemudian terdakwa dua menghubungi Waliyin dan mengatakan telah selesai melaku-

kan skin. Lalu terdakwa 1 mengecek leher dan masih ada denyut nadi. Lalu untuk membangkitkan nafsu birahi terdakwa 1 membuka video skin miliknya dengan orang lain, juga mengaktifkan film mutilasi kanibal 2006. Lalu mengaktifkan terdakwa 2 menyembelih korban dan terdakwa 2 menyetujuinya," lanjutnya lagi.

Selasa 11 Juli 2023 dinihari, Waliyin dan Ridduan membawa korban ke kamar mandi diletakkan di atas meja kecil dalam keadaan terungkep. Meski ada kesempatan mengungrung niat, nantinya keduanya tetap melanjutkan tindakan keji memutilasi korban.

Kemudian pukul 06.00 pagi, kedua terdakwa melakukan perjalanan untuk menyebar potongan tubuh korban di kawasan Turi Sleman. Diketahui mereka sempat merebus beberapa bagian tubuh untuk menghilangkan jejak. "Setelah menyebar potongan tubuh korban, keduanya kembali ke kos terdakwa satu. Kemudian pada Rabu 12 Juli terdakwa 1 mengantar terdakwa 2 kembali ke Jakarta dan hari itu pukul 12.00 siang, potongan tubuh korban ditemukan saksi saat sedang memancing di Sungai Bedog. Akhirnya kedua terdakwa ditangkap Polda DIY," tandasnya. (Sni)-f

Sambungan hal 1

Wapres

Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting Presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," katanya di Lanud Halim

Perdanakusuma Jakarta.

Jokowi menjelaskan bahwa jabatan Presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk Presiden dan para menteri. (Ant/Ati)-d

Sambungan hal 1

Ajukan

Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye. "UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

Kendati demikian, aturan tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara. Selain itu, ia menuturkan presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan berkampanye.

"Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondision-

al. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya," katanya.

Sementara fasilitas pengamanan, sambung Idham, boleh digunakan oleh presiden dan menteri. Pasalnya, UU Pemilu memberikan pengecualian pada fasilitas pengamanan. Ia enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya kekhawatiran konflik kepentingan bila presiden ikut kampanye. Idham menegaskan, KPU hanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. (Ant/Obi)-f



Prakiraan Cuaca						Jumat, 26 Januari 2024	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban	
Bantul					22-30	65-95	
Sleman					22-29	65-95	
Wates					22-29	65-95	
Wonosari					22-30	65-95	
Yogyakarta					22-30	65-95	

Muhammad Zuhdan, S.P.M.A.
Kaprodil Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta

Smart Village untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

1. Konsep Smart Village sebagai Solusi Inovatif

Smart Village merupakan konsep yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan di desa. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan desa yang lebih cerdas dalam pengelolaan sumber daya, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan menerapkan solusi teknologi cerdas, Smart Village menjadi kunci untuk memajukan desa secara berkelanjutan.

2. Peningkatan Akses Informasi dan Pendidikan

Salah satu elemen penting dari Smart Village adalah peningkatan akses informasi. Dengan memanfaatkan internet dan teknologi komunikasi, masyarakat desa dapat mengakses informasi terkini tentang pasar, teknik pertanian terbaru, dan peluang bisnis. Hal ini membantu petani dan pelaku usaha lokal untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil, sekaligus membuka peluang diversifikasi ekonomi di desa.

3. E-Commerce dan Pemasaran Produk Lokal

Pemanfaatan platform e-commerce dalam Smart Village menjadi sarana efektif untuk meningkatkan penjualan produk lokal. Dengan memanfaatkan situs web atau aplikasi khusus, produk-produk unggulan dari

desa dapat dijual secara online, menjangkau pasar yang lebih luas. Ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi desa tetapi juga membantu melestarikan produk tradisional yang memiliki nilai budaya.

4. Pemberdayaan Petani melalui Pertanian Berbasis Teknologi

Smart Village menghadirkan inovasi dalam sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi berbasis sensor, pemantauan cuaca, dan analisis data. Petani dapat memanfaatkan informasi real-time untuk memprediksi hasil panen, mengelola irigasi secara efisien, dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Pemberdayaan petani melalui teknologi ini dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

5. Penyediaan Layanan

Kesehatan Online

Smart Village juga mencakup penyediaan layanan kesehatan online untuk masyarakat desa. Telemedicine atau konsultasi kesehatan jarak jauh dapat meningkatkan akses masyarakat desa terhadap perawatan kesehatan. Ini tidak hanya memberikan solusi efisien tetapi juga dapat mempercepat deteksi dini penyakit, meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat desa secara keseluruhan.

6. Pelatihan Keterampilan Digital untuk Masyarakat Desa

Agar Smart Village dapat berfungsi dengan optimal, pelatihan keterampilan digital menjadi penting. Masyarakat desa perlu diberdayakan dengan keterampilan teknologi informasi dasar untuk dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan. Pelatihan ini

dapat mencakup penggunaan perangkat pintar, pengelolaan data online, dan pemanfaatan aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari.

7. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Smart Village juga membawa konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui teknologi sensor dan pemantauan, desa dapat mengelola penggunaan air, energi, dan limbah secara efisien. Pemanfaatan energi terbarukan, seperti panel surya, juga dapat menjadi bagian dari strategi Smart Village untuk menciptakan desa yang ramah lingkungan.

Penerapan konsep Smart Village menjadi kunci penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PADes) di daerah

pedesaan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Smart Village menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Implementasi Smart Village bukan hanya sebuah langkah inovatif tetapi juga investasi jangka panjang dalam menciptakan desa yang cerdas, maju, dan sejahtera. Dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Smart Village dapat menjadi solusi holistik untuk mewujudkan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. ***